



Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P

Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P., lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur, 13 Mei 1957, yang lebih dikenal dengan nama Mahfud MD adalah seorang politisi, akademisi dan hakim berkebangsaan Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024 Pemerintahan Presiden Joko Widodo - K.H. Ma'ruf Amin, dan juga sebagai Ketua Kompolnas dari unsur

Pemerintah. Mahfud MD dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019.

Mahfud MD pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008- 2013 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013. Sebelumnya ia adalah anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar Doktor pada tahun 1993 dari Universitas Gadjah Mada. Sebelum diangkat sebagai Menteri, ia adalah pengajar dan Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Semasa muda ia juga aktif sebagai aktivis PII dan HMI.

Karier dalam pekerjaannya sebagai berikut: Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1984 – sekarang), Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1986–1988), Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1988–1990), Direktur Karyasiswa, Universitas Islam Indonesia (1991–1993), Pembantu Rektor I Universitas Islam Indonesia (1994–2000), Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (1996–2000), Anggota Panelis dan Asesor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (1997–1999), Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (2002–2005), Rektor Universitas Islam Kadiri (2003–2006), Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (2010–), Ketua Dewan Penyantun Yayasan Alumni Undip Badan Penyelenggara Universitas Semarang (USM) (2018) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kabinet Indonesia Maju (2019–sekarang).

Jabatan pada lingkup pemerintahan adalah sebagai berikut: Plt. Staf Ahli dan Deputy Menteri Negara Urusan HAM (1999–2000), Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian Menteri Kehakiman (2000–2001), Anggota DPR RI, menempati Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif (2004–2008), Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI (sekarang), Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008–2013), Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017–2018), Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (2018-2020), dan Menkopolkam (2019-sekarang).

Organisasi yang pernah diikuti adalah : Pelajar Islam Indonesia (PII), Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (2010–), Dewan Pengasuh Forum Keluarga Madura Yogyakarta (2007–), Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) (2012–).

Sejumlah publikasi ilmiah juga telah dilakukan oleh Mahfud MD, yaitu : GUSDUR Islam, Politik dan Kebangsaan (Penerbit LKIS: 2010); On The Record, Mahfud MD di balik Putusan Mahkamah Konstitusi (Penerbit PT Raja Grafindo Persada: 2010); Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi dalam Liputan Pers (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: 2010); Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu (Penerbit PT. Raja Grafindo Persada: 2009); Politik Hukum di Indonesia (Penerbit PT. Raja Grafindo Persada: 2009); Dasar-Dasar dan Struktur Ke Tatanegaraan Indonesia (Penerbit Rineka Cipta: 2001); Potret Akademisi dan Politisi (Penerbit UII Press: 2006); Setahun Bersama Gus Dur, Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit (Penerbit LP3ES: 2003); Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Penerbit LP3ES: 2006).



Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D.

Mendagri selaku Wakil Ketua Korpri

Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 26 Oktober 1964 adalah seorang birokrat dan tokoh kepolisian Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia sejak tanggal 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, sekaligus sebagai Wakil Ketua Korpri dari unsur Pemerintah. Sebagai seorang perwira tinggi polisi, dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-23.

Tito Karnavian mengenyam pendidikan SMA Negeri 2 Palembang kemudian melanjutkan pendidikan AKABRI pada tahun 1987 karena gratis dan tidak ingin membebankan biaya orang tuanya. Tahun 1993, Tito menyelesaikan pendidikan di Universitas Exeter di Inggris dan meraih gelar MA dalam bidang *Police Studies*, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakarta tahun 1996 dan meraih Strata 1 dalam bidang *Police Studies*.

Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ditempuh di Sekolah Xaverius, kemudian sekolah menengah atas ditempuh di SMA Negeri 2 Palembang. Tatkala duduk di kelas 3, Tito mulai mengikuti ujian perintis. Semua tes yang ia jalani lulus, mulai dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kedokteran di Universitas Sriwijaya, Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Keempatnya lulus, tapi yang dipilih adalah AKABRI, terutama Akademi Kepolisian.

Tito termasuk seorang polisi yang mendapat kenaikan pangkat cukup cepat. Saat masih menyandang pangkat AKBP, ia memimpin tim Densus 88 yang berhasil melumpuhkan teroris Dr. Azahari di Batu, Jawa Timur, pada tanggal 9 November 2005. Pangkatnya dinaikkan, dan ia menerima penghargaan dari Kapolri saat itu, Jenderal Pol. Sutanto bersama dengan para komplotornya, seperti Idham Azis, Saiful Maltha, Petrus Reinhard Golose, Rycko Amelza Dahniel, dan yang lainnya.

Tito juga pernah memimpin sebuah tim khusus kepolisian yang berhasil membongkar jaringan teroris pimpinan Noordin M. Top. Atas prestasi ini, pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal Polisi dan diangkat menjadi Kepala Densus 88 Anti-Terror Mabes Polri. Kariernya terus menanjak, dan ia sempat menjabat sebagai Kapolda Papua dan Kapolda Metro Jaya. Pada tanggal 14 Maret 2016, ia diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggantikan Komjen. Pol. Saud Usman Nasution yang memasuki masa pensiun.

Pada tanggal 15 Juni 2016, Presiden Joko Widodo mengirim surat kepada DPR-RI, yang isinya menunjuk Tito sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Badrodin Haiti yang akan segera pensiun. Komisi III DPR-RI menyetujui usulan ini dalam sidang paripurna mereka yang digelar pada awal bulan Juli 2016. Tito resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi pada tanggal 13 Juli 2016.

Riwayat pendidikan Tito Karnavian, yaitu : SD Xaverius 4 di Palembang (1976), SMP Xaverius 2 di Palembang (1980), SMA Negeri 2 Palembang (1983), Akademi Kepolisian (1987); Penerima bintang Adhi Makayasa sebagai lulusan Akpol terbaik, *Master of Arts (M.A.) in Police Studies*, University of Exeter, UK (1993), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (1996); Penerima bintang Wiyata Cendekia sebagai lulusan PTIK terbaik, *Royal New Zealand Air Force Command & Staff College*, Auckland, New Zealand (Sesko) (1998), *Bachelor of Arts (B.A.) in Strategic Studies*, Massey University, New Zealand (1998), Sespim Pol, Lembang (2000), Lemhanas RI PPSA XVII (2011) penerima Bintang Seroja sebagai peserta Lemhanas terbaik, Ph.D in *Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamist Radicalization at S. Rajaratnam School of International Studies*, Nanyang Technological University, Singapore (*magna cum laude*) (2013).



Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

Menkumham selaku Anggota Kompolnas

Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., lahir di Sorkam, Tapanuli Tengah, 27 Mei 1953 adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Oktober 2014, juga sebagai Anggota Kompolnas dari unsur Pemerintah. Pada 23 Oktober 2019 ia dipilih kembali pada Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf. Ia sebelumnya duduk sebagai anggota DPR RI di Komisi II pada periode 2004-2009. Ia merupakan politisi PDI-P, berlatar belakang sebagai aktivis organisasi, akademisi, intelektual dan pimpinan di perguruan tinggi.

Pendidikannya adalah sebagai berikut : SR Katolik Sibolga (1959–1965), SMP Sibolga (1965–1968), SMA Katolik Sibolga (1968–1972), Sarjana Fakultas Hukum USU (1978), *Master* Virginia Commonwealth University (1986), Doktor North Carolina University (1994), *Internship in Higher Education Administration* Roanoke College, Salem Virginia, USA 1983- 1984.

Yasonna memulai karir bekerja sebagai Pengacara & Penasehat Hukum 1978-1983, kemudian menjadi pembantu dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen pada kurun 1980-1983. Kemudian sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen (1998-1999) dan peneliti di NCSU pada tahun 1992-1994. Ia juga menjadi Asisten Riset Departemen Sosiologi dan Antropologi di NCSU. Dan sejak tahun 2000 hingga saat ini ia masih menjadi dosen.

Mulai aktif berorganisasi sejak di BPC GMKI Medan pada 1976 dan Waka Bendahara KNPI Medan pada tahun 1983, ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris BKS PGI-GMKI Sumut-Aceh dan Ketua BKS PGI-GMKI Pusat periode 2009-2014, Ketua Umum Mahasiswa Nias. Ia terlibat dalam kepengurusan PDIP Sumatra Utara untuk rentang waktu 2000-2008. Juga sebagai Wakil Bendahara KNPI Medan dan Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Nias. Pada tahun 2002-2005 ia dipercaya sebagai Kepala Badiklatda PDI-P Sumut (2002-2005) dan Wakil Ketua DPD PDI-P Sumut (2000-2008).

Terjun ke politik praktis dengan menjadi anggota DPRD Sumut pada periode 1999-2004 dari Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, ia terpilih sebagai anggota DPR-RI mewakili PDI Perjuangan dari wilayah Sumatra Utara I. Di parlemen ia duduk sebagai anggota Komisi II dan tergabung dalam Badan Anggaran DPR RI. Di MPR-RI, ia menjadi Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjuknya menjadi Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Kerja 2014-2019. Kariernya sebagai Menteri Hukum dan HAM resmi berakhir pada 1 Oktober 2019, setelah ia melayangkan surat pengunduran dirinya ke Presiden Joko Widodo untuk menjadi anggota DPR periode 2019 - 2024. Tidak lama dilantik sebagai anggota DPR-RI periode 2019-2024 ia kembali mengundurkan diri dari posisinya sebagai wakil rakyat dikarenakan penunjukan kembali dirinya sebagai Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019- 2024.



Irjen Pol.(P) Dr. Benny Jozua Mamoto, S.H., M.Si.

Sekretaris/Anggota Kompolnas

Irjen. Pol. (Purn.) Dr. Benny Josua Mamoto, S.H., M.Si. (lahir di Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah, 7 Juni 1955; umur 66 tahun) adalah seorang purnawirawan Polri. Ia pernah menjabat sebagai Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Dalam kariernya di Polri ia berhasil mencapai jenjang kepangkatan Inspektur Jenderal. Ia dilantik Presiden RI sebagai Komisioner Kompolnas 2020-2024 dari unsur Pakar Kepolisian.

Tanda jasa yang pernah diraih oleh Irjen. Pol. (Purn.) Dr. Benny Josua Mamoto meliputi Satya Lencana Kestiaan 8 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun, Bintang Bhayangkara Nararya, dan Bintang Bhayangkara Nararya (Prestasi).

Kegiatan lainnya yang pernah diikuti antara lain: Dosen PTIK, Dosen Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian-Universitas Indonesia, mengajar di Pendidikan *Special Branch Polis Diraja* Malaysia, mengajar di JCLEC Semarang dengan materi tentang AI-JI dan Terorisme Penugasan luar negeri di bidang Olahraga Menembak, memimpin kontingen Indonesia sebagai Tim Manajer kontingen Indonesia di *World Cup* di Beijing dan lain-lain.

Kegiatan Sosial Kemasyarakatan: Hobby olahraga menembak. Pada saat menempuh pendidikan di AKABRI Kepolisian di Sukabumi, pernah menjuarai lomba menembak antar angkatan (Darat, Laut, Udara, dan Polisi) dengan merebut medali emas untuk kontingen AKABRI Kepolisian, melalui nomor senapan *big bore* (menembak senapan jarak 300m). Setelah lulus AKABRI, diarahkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Widodo Budidarmo, saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PB Perbakin, untuk bergabung sebagai atlet Perbakin. Di samping sebagai atlet menembak, ikut aktif melatih Tim menembak Bhayangkara Polda Metro Jaya dan Polri, serta sebagai Pelatih Nasional. Selanjutnya diminta menjadi Pengurus Cabang Olahraga Menembak (PERBAKIN) sebagai Kepala sekolah Menembak Perbakin; Pimpro Pelatnas *Sea Games* dan *Asian Games*; Pimpro Pelatnas *World Cup*; *Technical Delegate* PON Jakarta; *Technical Delegate* PON Jawa Timur; Ketua Komisi Pembinaan Prestasi PB Perbakin (2 periode); Wakil Ketua Bidang Target PB Perbakin (1 periode); Ketua Bidang Target PB Perbakin (2 periode); Pelatih Nasional Menembak; Jury Internasional Lisensi B.

Kegiatan Seni Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, antara lain: beberapa kegiatan yang sudah dan sedang diikuti adalah sebagai Ketua Umum Panitia Festival Maengket tingkat Nasional 2005, Ketua Panitia Penataran Pelatih Maengket tingkat Nasional di Cibubur 2006, Ketua Umum Panitia Seminar Nasional Maengket di Jakarta 2006, Ketua Umum Panitia Simposium Nasional Kolintang di Manado 2007, Ketua Umum Panitia Festival Seni Budaya Sulawesi Utara 2007 s.d. 2009, Ketua Umum Festival Pinawetengan 2010 & 2011, Ketua Umum Festival Malesung 2012. Wakil Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) 2008-2010, dan lain-lain.

Sebagai Ketua Umum Institut Seni Budaya Sulawesi Utara, antara lain: Menyenggarakan lomba dan penataran pelatih 9 (sembilan) jenis seni asal Sulawesi Utara; Sampai saat ini telah menerima Penghargaan sebagai Pemrakarsa rekor MURI terbanyak se-Indonesia sejumlah 30 (tiga puluh) rekor MURI dan 7 (tujuh) Rekor Dunia (*Guinness World Records*) di bidang seni budaya, pendidikan, promosi produk andalan daerah dan kuliner Sulawesi Utara. Ketua Umum Sulut *Green & Organik* dengan program penghijauan telah mendirikan lab kultur jaringan dan pembibitan Jabon merah (karumama), dll.



Irjen Pol.(P) Drs. Pudji Hartanto Iskandar, M.M.

Anggota KOMPOLNAS

Irjen Pol. (Purn.) Drs. Pudji Hartanto Iskandar, M.M, sebagai Komisioner KOMPOLNAS 2020-2024 dari unsur Pakar Kepolisian. Dilantik oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo pada tanggal 19 Agustus 2020 di Istana Negara, Jakarta. Ia merupakan purnawirawan Polri lulusan Akademi Kepolisian Batalyon Diviacita tahun 1983.

Pria kelahiran Sukabumi, Jawa Barat, 24 Agustus 1959 ini mengawali karirnya menjabat sebagai Kapolsek Ampat Koto, Kapolsek Bukittinggi Polda Sumatra Barat, Kabag Lantas Polwil Pekalongan, Kasat Lantas Polrestabes Semarang, Kapolres Bobonaro Polda Timor Timur, Kapolres Metro Tangerang Polda Metro Jaya.

Telah mengikuti beberapa rangkaian pendidikan pengembangan karir di Kepolisian yakni Pendidikan PTIK, Pendidikan Sespim Polri dan Lemhanas.

Sepanjang karir, tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting dan strategis, salah satunya sebagai Ajudan Wakil Presiden RI Hamzah Haz. Juga pernah menjabat sebagai Wakapolda Banten, Karo Binpolsus PPNS Sdeops Polri, Kapolda Kepulauan Riau, Irwil II Itwasum Polri, Staf Ahli Kapolri Bidang Manajemen, Kakorlantas Polri, Gubernur Akademi Kepolisian, Kapolda Sulselbar dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan periode 2016-2017 di era Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Pada saat menjabat 2 kali Kapolda yaitu Kapolda Kepulauan Riau memperoleh gelar sebagai "Datuk Sri Wangsa Jaya" di Kepulauan Riau oleh Lembaga Adat Melayu dan pada saat menjadi Kapolda Sulselbar kembali dianugerahi gelar kebesaran adat "*I Mapparewa Karaeng Ruppa*" dari Pemegang Amanah Raja dan Pemangku Adat Kerajaan Marusu di Sulawesi Selatan yang secara harfiah berarti selalu mengimbangi atau memiliki sifat adil dalam mengambil keputusan.

Pernah melaksanakan tugas misi perdamaian PBB melalui pengiriman pasukan kontingen Garuda ke Kamboja pada tahun 1992-1993 yang tergabung dalam UNTAC (*United Nations Transitional Authority in Cambodia*) dan sebagai delegasi untuk mengikuti Program Studi Banding antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bekerja sama dengan pemerintahan Jepang melalui Japan *International Cooperation Agency* (JICA).

Insha Allah bersama kita BISA (*Briliant, Inovative, Speed, Accountable*) merupakan *tagline* yang selalu diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugasnya.



Prof. Dr. A. Wahyurudhanto, M.Si

Anggota Kompolnas

Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si, sebagai Komisioner Kompolnas 2020-2024 dari unsur Pakar Kepolisian, setelah dilantik oleh Presiden RI pada tanggal 19 Agustus 2020. Keterlibatannya secara intensif dalam lingkup kepolisian diawali pada tahun 2003 sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK. Sebelumnya adalah wartawan pada harian Suara Merdeka Semarang selama 17 tahun. Alumnus S1 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro, S2 Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro, dan Doktor Ilmu Pemerintahan pada FISIP Universitas Padjadjaran.

Di STIK-PTIK mengampu mata kuliah Birokrasi dan Kebijakan Publik (S-3); Kebijakan Publik, Penulisan Ilmiah, dan Administrasi Kepolisian Kontemporer (S-2); serta Politik dan Kepolisian, Komunikasi Sosial, dan Polmas (S-1). Di samping juga sebagai Pimpinan Redaksi (*Editor in Chief*) Jurnal Ilmu Kepolisian.

Sebagai wartawan, berbagai *event* yang pernah diliput, antara lain Asian Games Hiroshima, Jepang (1994), Olimpiade, Amerika Serikat (1996), All England di London dan Birmingham, Inggris (1991-1996), Kejuaraan Dunia Bulutangkis di Laussane, Swiss (1995), sebagai anggota Misi Kebudayaan Indonesia di Lefkada, Yunani (1997), dan sebagai delegasi Indonesia dalam Kongres Wartawan se Asia Pasifik di Busan, Korsel (2002).

Sebagai dosen di STIK-PTIK, pelatihan yang pernah diikuti, antara lain, *Training of Trainers (TOT) for Capacity Building in Urban Infrastructure Management* (Jakarta, 2002), *Course of Disaster Management* (Jakarta, 2003), *Counter Terrorist Awareness Course in Counter Terrorism Crisis Management* (diselenggarakan oleh Cranfield University, di Jakarta, 2005), *Training Course about Community Policing* (Tokyo-Miyagi, Jepang, 2008), *Crime Stopper Seminar* (Perth, Australia, 2008), pelatihan Master Instruktur Standar Sistem Manajemen Keadaan darurat (SSMKD) yang merupakan program ICITAP (2009), *Workshop about Police Officers on Democratic Policing* (Bavaria, Jerman, 2013), *Police Management* (Seoul, Korea, 2016).

Dalam kaitan sebagai dosen di STIK-PTIK, pernah melakukan tugas dinas studi banding, antara lain ke Kepolisian Jepang (2008), Kepolisian Australia Barat di Perth (2009), Kepolisian Selandia Baru (2011), Sekolah Pimpinan Kepolisian di Sydney, Australia (2011), Kepolisian Kerajaan Thailand di Bangkok (2013), dan Kepolisian Jerman di Eichstätt, Bavaria, Jerman (2013). Di samping itu, pernah mengikuti Seminar *Community Policing*, di Bangkok Thailand (2013), *Work Shop Manajemen Kepolisian* di Seoul, Korsel (2015), Studi Banding Ilmu Kepolisian (Beijing, China, 2016; Seoul, Korea, 2016; Perth, Australia, 2017), serta seminar internasional di Budapest, Hungaria (2018), dan Saint Petersburg, Rusia (2019).

Ia aktif sebagai pembicara, moderator, maupun peserta di berbagai seminar tingkat nasional maupun internasional. Selain mengajar di STIK-PTIK, ia juga sebagai konsultan serta instruktur untuk program-program pelatihan di berbagai instansi dan BUMN untuk materi yang berkaitan dengan komunikasi, *community policing*, keamanan, manajemen krisis, dan kebijakan publik.



Dr. (C) Yusuf Warsyim

Anggota Kopolnas

Yusuf atau lebih dikenal Yusuf Warsyim sebagai Anggota Kopolnas masa bakti tahun 2020-2024 dari unsur Tokoh Masyarakat. Aktivitas Yusuf sebagai Unsur Tokoh Masyarakat lebih banyak di lingkungan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Keaktifannya saat ini di Koordinator Nasional Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (KORNAS FOKAL IMM) dari sejak tahun 2016 sebagai Anggota Dewan Pertimbangan. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) tahun 1999-2001, Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah masa amaliyah tahun 2010-2015. Selain di lingkungan Muhammadiyah, Yusuf juga aktif sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Utama (eLMU), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang pernah bermitra dengan Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pembinaan masyarakat dan sosialisasi peraturan perundangan-undangan kepada masyarakat DKI Jakarta.

Selain aktif dalam organisasi kemasyarakatan, Yusuf sebelum menjabat sebagai Anggota Kopolnas saat ini, telah cukup lama bekerja sebagai Tenaga Ahli di DPR-RI yang membidangi hukum dan etika. Sejak Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 sebagai Tenaga Ahli di Pimpinan Badan Kehormatan (BK) DPR RI serta Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 dan Tahun 2019- 2024 sebagai Tenaga Ahli di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD) yang kemudian mengundurkan diri pada tanggal 18 Agustus 2020 karena dilantik sebagai Anggota Kopolnas oleh Presiden RI Joko Widodo. Dari perjalanan bekerja tersebut, Yusuf telah berpengalaman di bidang penegakan etika, terutama kode etik DPR-RI. Dengan pengalaman tersebut, Yusuf ingin memperkuat Kopolnas memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) melalui pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional yang dimilikinya. Dengan keahliannya, Yusuf aktif menjadi Narasumber dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam kegiatan seminar dan rapat serta penyusunan peraturan DPRD tentang kode etik DPRD. Melalui MKD DPR-RI dari sejak Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 dan Tahun 2019-2020, dalam menjalankan pekerjaannya, Yusuf telah sering berhubungan dengan Polri, baik melalui kegiatan penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik Anggota DPR-RI yang terkait dengan adanya Laporan Polisi maupun melalui kegiatan sosialisasi fungsi, tugas, dan wewenang MKD DPR-RI di lingkungan kewilayahan Polri.

Pendidikan terkait dengan keahlian yang dimilikinya, Yusuf kuliah S2 Magister Hukum di Universitas Jayabaya dan saat ini masih berjalan kuliah S3 Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus Jakarta. Yusuf sebelumnya merupakan alumni S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara yang saat ini bernama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Selain pendidikan formal, Yusuf juga telah mengikuti pelatihan keahlian, diantaranya Pelatihan Para Legal tahun 1999 dan Pelatihan *Legislative Drafting* tahun 2015.

Karya tulis yang pernah dibuat Yusuf, diantaranya, Kekuasaan Presiden Dalam Pemberian Persetujuan Penyidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Tesis Magister Ilmu Hukum (2016), Terobosan Legislasi Sistem Etika Lembaga Perwakilan: Menimbang RUU Etika Lembaga Perwakilan, dalam Buku Menjaga Kehormatan Lembaga Perwakilan (MKD, 2016 dan 2019), dan Peran Etika Dalam Peningkatan Kinerja Anggota DPR-RI, dalam Buku Dinamika dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan, Buku (MKD, 2017).



H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H.

Anggota Kompolnas

Mohammad Dawam sebagai Komisioner Kompolnas 2020-2024 dari unsur Tokoh Masyarakat. Ia merupakan anak ke-7 dari delapan bersaudara buah pernikahan dari pasangan (Alm) Bapak Sukardi Sodikromo dengan (almh) Ibu Siti Masriah Bintu Kyai Mas'ud (Allahu Yarhamhumaa). Lahir di Pati, Jawa Tengah, tepat hari: Sabtu, 17 Januari 1976. Ia mengawali dunia pendidikan di Pesantren Mathaliul Huda dan Perguruan Islam Mathali'ul Falah, Kajen, Margoyoso, Pati. Selanjutnya menempuh pendidikan dengan Beasiswa Penuh dari Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta, melalui Lembaga Pendidikan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta hingga menempuh jenjang Diploma Umum (Ad-Diblum Al-'Amm) pada tahun 2000. Pendidikan S1 ditempuh di IAIA Jakarta dan dilanjutkan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Mpu Tantular Jakarta.

Beberapa karya terjemah secara *freelance* dan tulisannya bergenre agama dan sosial diantaranya adalah: 1). Buku Terjemah "Rahasia Pria & Wanita", Pustaka Azzam, Jakarta, 1999; 2). Buku Terjemah "Serat-serat Akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah" (Seri Tesis yang Mengupas Pokok Pikiran Imam Asy'ari), Pustaka Azzam, Jakarta, 2001; 3). Buku Suntingan "Membunuh Orang Murtad: Sebuah Kejahatan Agama", Pustaka NIQAS, Jakarta, 2002; 4). Penulis Buku "Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA : NU Sejak Lahir"; Dari Pesantren untuk Bangsa, Kado Buat Kyai Said, SAS Center, Jakarta, 2010; 5). Penulis Buku "Smart Nikah" (Cinta, Seks, Fiqh dan Motivasi Hidup: Desain Pasangan Harmonis), Jagad Wacana Press, Jakarta, 2011; 6). Penulis Tesis "Peranan Komisi Informasi Dalam Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945" yang telah diseminarkan pada 09 November 2015.

Pada periode 2004-2009, ia berkhidmah sebagai Wakil Sekretaris PP. LTN-NU (Lembaga Pengembangan Informasi dan Publikasi Nahdlatul Ulama). Pada periode ini juga sekaligus mendapat amanah sebagai Pelaksana Program pada Biro Kerja Sama Beasiswa PBNU untuk Timur Tengah dan berhasil mengirim kader-kader Nahdlatul Ulama dari berbagai wilayah di Indonesia diantaranya ke Universitas Internasional Afrika, Sudan; ke Hauzah Ilmiah Qom, Iran; Kuliah Dakwah Islamiyah Tripoli, Libya; Universitas Syaikh Ahmad Kaftaro Damaskus, Syria; Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia dan Universitas Al-Qarawiyyin, Maroko. Saat ini para alumninya telah menyebar mulai S1, S2 hingga Doktor diberbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pada lapangan pengabdian di masyarakat.

Di PP. LTN-NU berlanjut pada periode berikutnya: 2009-2014. Sejak periode 2014 hingga sekarang tercatat sebagai Wakil Sekretaris Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWP-NU). Pada tahun 2009, secara khusus diminta Prof. K.H. Said Aqil Siroj, M.A. menghadiri undangan Presiden Libya, (alm) Moammar Qaddafi bersama elemen Ormas Islam Indonesia dan tokoh-tokoh Dunia Islam pada acara peringatan "*The International Celebration of Maulidurrasuu'*". Pada tahun 2010 ditugaskan oleh Negara sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia yang diterjunkan di Daerah Kerja Makkah Al-Mukarramah, Saudi Arabia.

Gus Dawam, sapaan akrab di antara rekannya tercatat sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Periode 2012-2016 berdasar Keputusan Gubernur Nomor:157/2012 dan Periode 2016-2020 berdasar Keputusan Gubernur Nomor: 301 Tahun 2016 dan Keputusan Gubernur Nomor: 493 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2016-2020 dan yang juga telah mengundurkan diri sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 24 Agustus 2020 setelah ditetapkannya sebagai Anggota Komisi Kepolisian Nasional Periode 2020-2024 berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional.

Di sela-sela tahun 2012, ia telah mengantongi ijin sebagai Mediator Bersertifikat: Mediator Indonesian *Institute for Conflict Transformation* (IICT-Universitas Indonesia) terakreditasi Mahkamah Agung RI. Saat di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sudah ratusan Sengketa Informasi Publik yang berhasil dilakukannya dengan proses Mediasi. Ia dapat dihubungi melalui kanal kontak personal: 0812-1310-0976 atau via email: mohammaddawam1976@gmail.com.



Poengky Indarti, S.H., LL.M.

Anggota KOMPOLNAS

Poengky Indarti menjabat sebagai Komisioner KOMPOLNAS 2020-2024 dari unsur Tokoh Masyarakat. Poengky merupakan perempuan satu-satunya sebagai Komisioner KOMPOLNAS terpilih mengemban jabatan selama dua periode (2016-2020 dan 2020-2024). Ia merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1993. Ia memulai dunia perpolitikan dan penindasan Hak Asasi Manusia di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya periode 1993-2000, Poengky mendapatkan jabatan pertama pada tahun 1998 sebagai Wakil Direktur Bidang Operasional. Selain mengabdikan diri di LBH Surabaya, Poengky juga dikenal sebagai pengacara yang mengangkat isu-isu tentang penindasan masyarakat di Surabaya.

Pada tahun 2000, Poengky pindah ke Jakarta. Ia melanjutkan karier di bidang yang sama, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH). Poengky tetap konsisten dengan perjuangan yang telah dirintisnya, ia mengurus problematika dan dilema yang dihadapi oleh para buruh. Di periode 2001-2002 aktivis ini menduduki jabatan sebagai Kepala Divisi Perburuhan dan *Fund Raising*.

Tidak puas dengan sarjana yang telah didapatkan di Universitas Airlangga, Poengky melanjutkan perkuliahannya di *International Human Rights Law*, Northwestern University School of Law, di Chicago Amerika Serikat dengan gelar Master untuk *International Human Rights Law* pada tahun 2003. Selama perkuliahan, ia tidak lepas tangan terhadap pekerjaan yang diemban di Jakarta, Poengky bekerja membantu KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) pada Divisi Kampanye dan Hubungan Internasional.

Pada tahun 2002 berdiri Imparsial *The Indonesian Human Rights Monitor* (Imparsial), Poengky tercatat sebagai salah satu pendiri LSM dari 18 orang penggerak HAM lainnya. Imparsial sendiri adalah salah satu LSM yang bergerak di bidang pengawasan dan penyelidikan pelanggaran HAM di Indonesia. Selanjutnya ia menjabat beberapa kedudukan di Imparsial meliputi Direktur Eksternal, *Managing Director*, Direktur Eksekutif, dan Peneliti Senior.

Sementara pengalaman organisasi diantaranya, yaitu: HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Anggota Dewan Etik AJI Surabaya, Anggota Konsorsium Pembela Buruh Migran (KOPBUMI), Anggota Badan Pendiri Imparsial – *the Indonesian Human Rights Monitor*, Anggota Badan Pendiri *Demos, Research Center for Indonesian Democracy*, Anggota *the Indonesian Fulbright Society*, Anggota Board YSIK (Yayasan Sosial untuk Kemanusiaan Indonesia), Ketua INFID (*International NGO Forum on Indonesian Development*), Ketua Dewan Etik INFID, Anggota *Board Human Rights Working Group (HRWG)*, Anggota *Executive Committee the Asia Forum for Human Rights (FORUM-ASIA)*, Anggota *Board* Komite Solidaritas untuk Munir (KASUM), Anggota *Board* Aliansi Demokrasi untuk Papua/ALDP, Anggota Jaringan Damai Papua, Anggota Forum Akademisi untuk Papua Damai, Ketua Indonesia *Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF)*, Anggota Badan Pendiri Imparsial, Sekretaris Indonesia *Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF)*, Ketua Dewan Pengawas Yayasan Museum HAM Omah Munir, dan Anggota Pendiri INSPECTUS.